

2010
3.839
18.484
2011 Kebijakan dan Manajemen Publik
4.953 Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016

ISSN 2303 - 341X

Harga
Perawatan Tidak Intensif
62002 Kesadaran Masyarakat Kurang
10.000 Kualitas Komoditas Rendah
s/15.2800
22000,-
26.050,-
Pasar
Dj 14 keluar desa
Dj 600 di Desa itu Sendiri
Bj 400 an di sepanjang jalan desa
Bj 15 an di sepanjang jalan desa
9.474
6.754

STUDI PERBANDINGAN TENTANG KETIMPANGAN HASIL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AGROPOLITAN (Perbandingan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa Ngringinrejo Dan Desa Wedi Kabupaten Bojonegoro)

KHOIRUL FATIHIN

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Indonesia has the high potential of the agricultural sector, but this potential is not followed by the level of welfare of farmers. The development concept has been done also creates inequality in urban and rural areas. To that end, the government uses agropolitan concept for the regional development of Indonesia. The problem in this research is the inequality of result in Ngringinrejo village which main commodities is Starfruit and Wedi village which main commodities is Salak fruit. This inequality seen in three aspects, productivity, price, and ease of marketing. This study used a qualitative approach and comparative type of research. There are five aspects are compared: (1) Management Development Agropolitan; (2) Physical Condition agropolitan Region; (3) Implementing Agency at the Village Level Agropolitan Policy; (4) Village Government Support; and (5) Community Support. Based on the discussion of qualitative analysis, it was found that the conditions of the five aspects can be said to be much different in the two villages. But beyond that there are conditions where the two villages experienced the same thing that is when the initial implementation of the policy. The condition is referred to as "the phenomenon of price trap". The condition is caused by lower commodity prices, causing the village government's commitment in implementing policies too low, followed by public awareness in support of the policy is also low so care for commodities is also low, and the quality is too low lead and eventually back causing low price. However, the difference is that the village Ngringinrejo able to get out of this condition with the new administration at the end of 2013. While the conditions in the village of Wedi compounded by request of irrigation did not respected by district government.

Key Words : Comparative, Inequality of result, Implementing Policy, Agropolitan

PENDAHULUAN

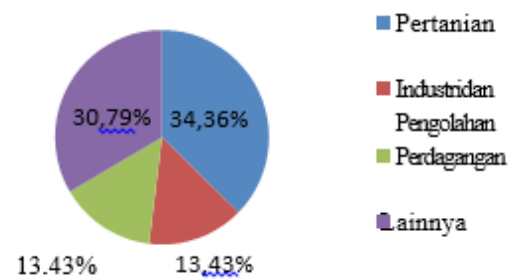
Alam menjadi sumber kekayaan penting bagi negara manapun, termasuk Indonesia yang merupakan negara agraris, dengan jumlah penduduk sebagian besar hidup di perdesaan dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sebagai negara tropis dengan dua musim, Indonesia dilimpahi berkah kesuburan tanah yang mendukung tumbuhnya berbagai macam jenis tumbuhan. Secara geografis, alam Indonesia sangat potensial untuk kegiatan pertanian. Kondisi ini menguntungkan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Secara alamiah, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pertanian. Apabila mampu dikelola secara optimal, keunggulan ini menjadi pondasi yang menopang kemandirian pangan nasional.

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menunjang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sampai dengan tahun 2013, kontribusi sektor ini berada pada urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Menurut data BPS, pada

tahun 2013, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia yakni sebesar 14,4 persen di bawah sektor

Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016

perdesaan bergantung dari sektor ini. Sebesar 34,46% dari angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas. Kemudian diikuti dengan 21,42% pada sektor perdagangan dan 13,43% di industri pengolahan, serta 30,79% sisanya di lapangan pekerjaan lainnya. Artinya, sektor pertanian masih menjadi penyedia lapangan yang sangat potensial bagi Indonesia. Berikut ini adalah struktur penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utamanya.



Grafik 1. Struktur Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2013

Industri Pengolahan sebesar 23,70 persen. Tidak hanya berkontribusi pada PDB Indonesia, sektor pertanian

sudah menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat kebanyakan. Sebagian besar masyarakat Indonesia di

Sumber : BPS, Potensi Pertanian Indonesia : Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013

Berbanding terbalik dengan jumlah lapangan kerja di sektor pertanian, tingkat kesejahteraan pelaku pertanian itu sendiri justru sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2013. Sebanyak 68,7 % rumah tangga miskin yang ada di perdesaan adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan 8,7 % adalah mereka yang tidak bekerja dan 4,8 % bekerja pada sektor Industri, serta 17,8 % sisanya adalah pekerjaan lainnya. Artinya, meskipun sektor pertanian mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang begitu luas, bukan berarti kesejahteraan dari pelaku pertanian sendiri masih memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Berikut adalah datanya:

Grafik 2. Persentase Rumah Tangga Miskin di Perdesaan menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga Tahun 2013

Pertanian

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota dan Desa Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)		
	Kota	Desa	Kota + Desa
Maret 2011	11,05	18,97	30,02
Sep-11	10,95	18,94	29,89
maret 2012	10,65	18,49	29,13
Sep-12	10,51	18,09	28,59
maret 2013	10,33	17,74	28,07
Sep-13	10,63	17,92	28,55

Sumber: BPS (diolah)

Berkaitan dengan permasalahan ketimpangan desa-kota di atas maka salah satu ide yang dikemukakan adalah mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri, dimana keterkaitan dengan perekonomian kota harus bisa diminimalkan. Untuk hal tersebut, Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan merupakan salah satu pendekatan pembangunan perdesaan berbasis pertanian dalam artian luas (termasuk kegiatan agrowisata, minapolitan dan sebagainya), dengan menempatkan „kota-tani sebagai pusat kawasan dan ketersediaan

30,798,70% sumberdayanya, sebagai modal tumbuh dan berkembangnya kegiatan saling melayani dan mendorong usaha agrobisnis antar desa-desa kawasan (*hinterland*) dan desa-desa sekitarnya. Sehingga

4,80%

Sumber : BPS, Potensi Pertanian Indonesia : Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013

Pembangunan pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada, baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pada saat yang sama, pembangunan juga memunculkan adanya kesenjangan, baik itu secara individu maupun secara kelompok masyarakat, bahkan kesenjangan juga terjadi antar wilayah atau

kawasan. Seperti halnya yang sering terjadi adalah kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada umumnya, wilayah perkotaan lebih maju dalam berbagai aspek dibandingkan dengan wilayah pedesaan, misalkan secara infrastruktur, akses informasi dan lain sebagainya. Berkembangnya kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ternyata tidak memberikan efek penetesan ke bawah (*trickle down effect*), tetapi justru menimbulkan efek pengurasan sumberdaya dari wilayah di sekitarnya (*backwash effect*), dimana sumberdaya-sumberdaya yang ada di pedesaan terserap menuju ke daerah perkotaan, baik itu sumberdaya alam, tenaga kerja bahkan modal sekalipun. Hal ini yang kemudian menjadikannya konsentrasi penduduk miskin lebih banyak di pedesaan daripada di perkotaan. Seperti halnya di dalam tabel di bawah ini.

terwujudnya sistem usaha agribisnis antara perkotaan dan pedesaan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu Kabupaten yang menerapkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan adalah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan *assesment* yang dilakukan melalui forum- forum FDG, lokakarya, dan *workshop* antara Pemkab dan *stakeholder* terkait, yang dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai 2009 maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan 3 kecamatan sebagai wilayah agropolitan di Kabupaten Bojonegoro yaitu : Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Kalitidu atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menyebutnya sebagai Kawasan

Agropolitan KADEKA. Ketiga kecamatan ini dipilih berdasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu, antara lain:

1. Geografis strategis, pusat produksi penghasil bahan baku dan transit.
2. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya pertanian baik.
3. Demografis tingkat penduduk tinggi sebagai pensuplai tenaga kerja.

4. Infrastruktur relatif baik untuk mendukung agribisnis.

5. Memiliki komoditas unggulan yang potensial.

6. Kelembagaan petani dan SDM mendukung.

7. Respon masyarakat

dan pamong terhadap program pembangunan tinggi.

8. Memiliki potensi agrowisata.
9. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bojonegoro.
10. Memiliki embrio usaha agribisnis

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Bojonegoro melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/183A/KEP/412.12/2008 menetapkan ketiga kecamatan ini sebagai lokasi pengembangan kawasan budidaya agropolitan di Kabupaten Bojonegoro. Komoditi unggulan dari ketiga kecamatan tersebut antara lain yaitu (1) Kecamatan Kapas dengan Komoditi unggulan Salak Wedi, (2) Kecamatan Dander dengan komoditi unggulan Peternakan dan Perikanan, serta (3) Kecamatan Kalitidu dengan komoditi unggulan buah belimbing.

Setelah kurang lebih selama 5 tahun berjalan, yakni pada tahun 2015, mulai terlihat hasil dari kebijakan tersebut. Namun hasil ini dapat dikatakan tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Dua desa yang nantinya akan menjadi lokasi penelitian dalam hal ini menunjukkan hasil yang berbeda. Kedua desa tersebut adalah Desa Ngringinrejo yang terletak di Kecamatan Kalitidu dengan komoditi unggulan yaitu buah belimbing, dan Desa Wedi yang terletak di Kecamatan Kapas dengan komoditi unggulan yaitu buah salak. Dua desa ini dipilih berdasarkan kesamaan kondisi dimana keduanya mengembangkan wilayah berbasis komoditi buah-buahan, berbeda dengan satu kecamatan lain yaitu kecamatan Dander dengan komoditi peternakan dan perikanan. Ketimpangan hasil tersebut antara lain ditunjukkan dengan jumlah produksi buah belimbing dan salak di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini komoditi buah belimbing Kabupaten Bojonegoro relatif mengalami kenaikan pasca ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Sedangkan jumlah produksi buah salak Kabupaten Bojonegoro justru cenderung turun. Berikut adalah datanya.

Tabel 2. Jumlah Produksi Buah Belimbing dan Salak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2015

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro 2016, (Diolah)

Selain jumlah produksi komoditas yang menunjukkan ketimpangan, kondisi lain yang menunjukkan ketimpangan hasil adalah harga komoditas dan kemudahan pemasaran. Buah belimbing, dalam hal ini di desa Ngringinrejo mengalami kenaikan hingga 100 % sejak ditetapkannya desa tersebut sebagai kawasan agropolitan, Sedangkan harga buah salak di Desa Wedi tidak mengalami perubahan dari ditetapkannya sebagai kawasan agropolitan hingga sekarang. Terkait dengan kemudahan pemasaran, dimana sebelum ditetapkan sebagai kawasan agropolitan, warga Desa Ngringinrejo kesulitan untuk menjual hasil panen belimbingnya, bahkan hingga buah terlalu masak, sehingga harus dibawa dan dijual ke kota-kota sebelah. Sedangkan untuk Desa Wedi, cara pemasaran dari dulu hingga sekarang juga tidak mengalami perubahan. Berikut

adalah data kondisi sebelum dan sesudah kedua desa ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan budidaya agropolitan.



Tabel 3. Kondisi Desa Sebelum dan Sesudah Ditetapkan Sebagai Lokasi Kawasan Agropolitan

Sumber : Data Primer (Diolah)

Penelitian terkait dengan konsep pengembangan kawasan budidaya agropolitan juga pernah dilakukan di Desa Ngringinrejo dengan judul “Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Agropolitan di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro” oleh Alifatul Khoiriyah dkk. pada tahun 2014. Terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yakni terkait dampak sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat dengan adanya agrowisata belimbing di Desa Ngringinrejo. Selain itu, penelitian terkait kebijakan pengembangan kawasan agropolitan juga pernah dilakukan oleh Ardhana Januar Mahardhani pada tahun 2012 dengan judul “Implementasi Kebijakan Agropolitan di Kabupaten Tulungagung (Studi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Sendang Kabupaten Tulungagung)”. Dalam penelitian tersebut, kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan dilihat dari dua komponen yaitu isi kebijakan dan implementasi kebijakan. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Yulistyo Suyatno dengan judul “Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan di Kabupaten Semarang” pada tahun 2008 dengan fokus permasalahan adalah adanya kesenjangan antara perencanaan strategi

pengembangan kawasan agropolitan yang dicanangkan pemerintah dan penerapannya di Kabupaten Semarang.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada permasalahan ketimpangan hasil kebijakan pengembangan kawasan budaya agropolitan yang terjadi di dua desa yakni Desa Ngringinrejo dan Desa Wedi Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan tersebut dilihat melalui metode perbandingan dimana dalam hal ini peneliti tidak hanya melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan budaya agropolitan di wilayah yang berhasil tetapi juga di wilayah yang kurang berhasil sehingga diharapkan penelitian ini lebih kaya akan gambaran pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan budaya agropolitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian perbandingan (komparatif) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2005 : 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan / atau perbedaan dari dua kelompok atau lebih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2005 : 4) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan/atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini berlokasi di dua desa yakni Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu dan Desa Wedi, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan dilakukan selama 5 bulan dengan rincian tiga bulan pertama yakni pada bulan desember 2015 sampai dengan bulan maret 2016 dilakukan pengumpulan data awal terkait perubahan-perubahan pasca kedua desa tersebut ditetapkan sebagai kawasan budidaya agropolitan. Serta dua bulan selanjutnya yakni pada bulan April 2016 hingga Juni 2016 dilakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan di dua desa lokasi penelitian tersebut.

Dalam penelitian kali ini, penentuan informan menggunakan teknik *key person*. Pemilihan *key person* ini tetap berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yakni informan adalah *stakeholder* yang terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan ini, baik itu di tingkat Kabupaten maupun tingkat desa. Menurut Bungin (2007), teknik *key person* digunakan apabila peneliti telah mengetahui informasi terlebih dahulu tentang objek penelitian, sehingga dapat menentukan siapa yang menurutnya cocok sebagai informan.

Sementara teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, pengumpulan data online dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan menurut padangan Miles dan Huberman (1992 : 16), yakni analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, terus-menerus, dan berulang-ulang. Ketiga kegiatan tersebut antara lain : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber yakni membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, selain itu juga membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

a. Perencanaan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012), agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan tipe *bottom-up* yang berkeinginan mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan.

Kunci keberhasilan dari konsep agropolitan ini adalah menetapkan setiap distrik (desa) sebagai suatu unit

tunggal yang otonom dan mandiri yang mampu mengatur perencanaan serta pelaksanaan secara mandiri namun tetap terintegrasi secara sinergis dengan sistem pengembangan wilayah kabupaten atau di atasnya.

Dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa Ngringinrejo, proses perencanaan yang terjadi adalah perpaduan antara desa dan kabupaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten menyatakan bahwa seharusnya yang lebih berperan di sini adalah pihak desa yang secara sadar dan mandiri mengelola desanya untuk menjadi kawasan agropolitan. Sedangkan pihak Kabupaten membantu mengarahkan dalam perencanaan tersebut dan menyiapkan regulasinya. Dalam hal ini di Desa Ngringinrejo juga diadakan pertemuan bulanan yang disebut *kemis pon-an* atau yang dilaksanakan setiap hari kamis *pon* (kalender jawa) di setiap bulannya. Sedangkan dalam kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa Wedi, Ketua Gapoktan Salak Desa Wedi mengatakan bahwa semua kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan evaluasi semuanya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

b. Pendanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

Terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam pendanaan pada pengembangan kawasan agropolitan. Pertama adalah fakta bahwa sumber dana yang terdapat pada pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah. Dan yang kedua adalah biaya penggunaan teknologi dan kecocokannya dengan kondisi masyarakat dan lokasi desa (Douglass, 1981). Pembiayaan program yang ada di desa pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat petani, pengelola hasil, pemasar, dan penyedia jasa. Selain itu, dana stimultan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk membiayai prasarana dan sarana yang bersifat publik dan strategis.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bojonegoro, pembiayaan dilakukan berdasarkan sistem *sharing* anggaran. Dinyatakan oleh Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro sekaligus Sekretaris UPT Agropolitan Kabupaten Bojonegoro, anggaran dapat diperoleh dari semua pihak yakni Kabupaten, desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ataupun dari pihak lain seperti CSR (*Corporate Sosial Resoncibility*).

Sementara itu, dari pihak Desa Ngringinrejo menyatakan bahwa selama ini dana yang digunakan dalam pengembangan kawasan agropolitan di desa Ngringinrejo mayoritas berasal dari swadaya, dalam artian setiap petani belimbing memiliki andil yang cukup besar dalam menyumbang dana tersebut. Selain itu, dana juga banyak berasal dari kas Pokdarwis yang diperoleh melalui tiket masuk sebesar Rp. 1000,- yang dibebankan kepada setiap pengunjung yang masuk kawasan agrowisata tersebut. Di samping itu, pemerintah desa juga memberikan kontribusi dana melalui alokasi dari APBDes. Sedangkan dari pihak Kabupaten juga memberikan pendanaan dalam bentuk fasilitas-fasilitas seperti gazebo, pemavingan, ataupun memberikan semacam pelatihan-pelatihan kepada pihak desa. Hal yang sama sebenarnya juga dilakukan di Desa Wedi, yakni pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur dan sudah berdiri bangunan-bangunan

seperti gapura, perbaikan jalan, penerangan, dan gazebo. Namun keberlanjutan dari hal tersebut tidak ada lagi, dalam artian dibiarkan begitu saja. Bahkan untuk bangunan semacam kios yang dibangun pemerintah Kabupaten ditinggalkan begitu dalam kondisi tidak terawat.

c. Monitoring dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

Pemerintahan pusat memegang peranan untuk mengawasi dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan. Selain itu, pemerintah pusat juga menjadi sumber legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan daerah. Sedangkan kawasan agropolitan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumberdaya untuk tujuan pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, pengawasan dilakukan oleh pihak Kabupaten Bojonegoro melalui rapat koordinasi yang diadakan secara berkala. Tidak hanya sebagai sarana koordinasi, rapat ini juga sebagai sarana *monitoring* dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang diadakan di desa-desa yang ditetapkan menjadi lokasi pengembangan kawasan agropolitan.

Dari pihak Desa Ngringinrejo juga membenarkan bahwa untuk pengawasan dilakukan oleh pihak Kabupaten, dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Pariwisata. Sebagai sarana evaluasinya, Ketua Kelompok Tani Mekarsari Desa Ngringinrejo mengatakan bahwa setiap bulan Pokdarwis membuat laporan kepada Dinas Pariwisata. Selain itu setiap masyarakat juga melakukan pengawasan dan evaluasi melalui pertemuan yang diadakan setiap kamis *pon*. Sedangkan di Desa Wedi sendiri, karena selama ini tidak ada kegiatan apa pun, bahkan lembaga yang fokus untuk pengembangan komoditas salak sendiri tidak ada, akhirnya fungsi *monitoring* dan evaluasi tidak berjalan.

Aspek Kritis dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

1. Kondisi Fisik Kawasan Budidaya Agropolitan

a. Tingkat Kesesuaian Sumber Daya (Tanaman) dengan Kondisi Tanah Desa

Memiliki sumber daya atau komoditas dalam hal ini tanaman yang sesuai dengan tanah desa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kawasan agropolitan. Menurut Mahi (2014) Kesesuaian ini tidak hanya pada aspek kegiatan budidaya (*on-farm*) tetapi juga kegiatan *off-farm*, yaitu mulai pengadaan sarana dan prasarana pertanian (seperti benih/bibit, pupuk dsb), kegiatan pengolahan hasil pertanian (seperti membuat produk olahan, produk makanan ringan dll), sampai dengan kegiatan pemasaran hasil pertanian (seperti bakulan, warung jual beli hasil pertanian, pasar lelang dsb) dan juga kegiatan penunjang lainnya seperti pasar hasil agrowisata.

Pada dasarnya, kedua desa memiliki komoditas yang serupa yakni buah-buahan, dimana kedua komoditas (belimbing dan salak) di dua desa tersebut sama-sama sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam hal ini desa Ngringinrejo memiliki komoditi utama yaitu buah belimbing. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pohon belimbing sudah ada sejak puluhan tahun di desa tersebut. Sedangkan Buah salak

sejak dahulu juga sudah ada di Desa Wedi, bahkan sejak tahun 1980-an, sehingga secara logika, tanaman salak memang cocok dengan kondisi tanah Desa Wedi.

b. Tingkat Ketahanan Tanaman terhadap Musim

Selain sesuai dengan kondisi tanah setempat, sumber daya atau komoditas tanaman juga harus cocok dengan kondisi musim setempat. Musim menjadi faktor yang krusial bagi pelaku usaha di bidang pertanian karena pada dasarnya pertanian membutuhkan kesuburan tanah dan suplai air untuk mendukung tercapainya kualitas pertanian yang optimal.

Tanaman belimbing di Desa Ngringinrejo termasuk tanaman yang cocok di segala cuaca, dalam hal ini cocok dengan dua musim yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Bahkan Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang dikenal dengan cuaca ekstrim dimana ketika musim penghujan akan tergenang banjir di beberapa wilayah, dan ketika musim kemarau juga terjadi kekeringan di banyak wilayah. Sedangkan untuk Desa Wedi, Desa Wedi bukan termasuk desa yang menjadi "langganan" banjir setiap tahunnya, karena letak desa yang tidak dilintasi sungai besar, dan memang setiap musim hujan tidak terkena banjir sehingga salak dapat berkembang dengan baik, karena salak sendiri termasuk tanaman yang tidak butuh banyak air. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika musim kemarau. Di Desa Wedi sendiri, diakui oleh Kepala Desa setiap musim kemarau kekurangan air. Kekurangan air ini berdampak pada kualitas buah salak yang tidak mampu berkembang dengan baik.

c. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penting bagi pengembangan kawasan agropolitan. Menurut Mahi, (2014), memiliki berbagai sarana dan prasarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, antara lain : jalan, pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.

Dalam pelaksanaannya di kedua desa, kondisi fisik secara infrastruktur yakni sarana dan prasarana pendukung, dimana sebenarnya kedua desa ini mendapat perlakuan yang sama dari pihak Kabupaten yaitu bantuan infrastruktur di awal periode kebijakan tersebut dilaksanakan yakni sekitar tahun 2010. Bantuan infrastruktur tersebut antara lain berupa gapura sebagai pintu masuk desa, kemudian perbaikan jalan termasuk pemavingan, serta penerangan dan gazebo atau kios-kios di lokasi agrowisata. Yang menjadikannya berbeda adalah bahwa kekurangan-kekurangan infrastruktur seperti pagar, atau tuju yang berfungsi sebagai pelengkap dan "pemanis" dalam agrowisata oleh Desa Ngringinrejo dilengkapi secara swadaya oleh masyarakat, sedangkan di Desa Wedi, infrastruktur yang telah ada bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali terutama kios yang dibiarkan tidak terawat dengan baik.

2. Lembaga Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Tingkat Desa

a. Tingkat Kejelasan Struktur Lembaga Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Tingkat Desa

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007) melihat bahwa pembicaraan mengenai

implementasi kebijakan tidak terlepas dari karakteristik badan-badan pelaksana, yang mengarah pada struktur birokrasi. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan. Keberadaan struktur yang jelas ini dibutuhkan untuk dalam aspek selanjutnya yaitu pembagian tugas dan wewenang pelaksana kebijakan. Tanpa adanya struktur yang jelas maka pembagian tugas dan wewenang juga tidak jelas dan akan berakibat pada implementasi kebijakan agropolitan yang tidak terarah pula.

Di Desa Ngringinrejo, terdapat lembaga-lembaga yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan kawasan budidaya agropolitan. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan intruksi dari Pemerintah Kabupaten maupun inisiatif sendiri berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa. Lembaga tersebut antara lain, Kelompok Tani Mekarsari, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tulip. Sedangkan di Desa Wedi terdapat tiga kelompok tani, yang kemudian digabung menjadi satu yakni Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Salak Desa Wedi.

b. Tingkat Kejelasan Pembagian Tugas dan Wewenang Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Tingkat Desa

Kebijakan agropolitan merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu badan pelaksana. Untuk itu, pembagian tugas dan wewenang harus jelas antar badan pelaksana tersebut. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2014), dalam implementasi kebijakan tugas-tugas harus diperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat. Hal ini merupakan salah satu syarat suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik. Namun, apabila melihat kondisi masyarakat desa, Weber dan Parson dalam Hermawati (2004), salah satu ciri yang menonjol dari masyarakat desa adalah belum adanya pembagian kerja yang jelas, sehingga dalam hal ini kebijakan agropolitan dimana kebijakan ini berpusat pada masyarakat desa harus mampu memperjelas pembagian tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat desa yang seperti itu.

Di Desa Ngringinrejo, pembagian tugas dilakukan secara tegas dan jelas dimana Kelompok Tani Mekarsari yang berfokus pada budidaya tanaman belimbing, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bertugas mengelola Agrowisata Belimbing Desa Ngringinrejo, kemudian ada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tulip yang membuat olahan-olahan dari buah belimbing yang kemudian dijual di lokasi agrowisata. Sedangkan di Desa Wedi keberadaan lembaga-lembaga yang fokus pada pengembangan atau budidaya salak tidak ada. Meskipun terdapat tiga kelompok tani, yang kemudian digabung menjadi satu yakni Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Salak Desa Wedi, bukan berarti lembaga tersebut fokus pada pengembangan komoditas salak. Bahwa anggota-anggota dari kelompok tani tersebut memang memiliki tanaman salak masing-masing namun tidak terlalu dirawat dengan sungguh-sungguh lantaran harga yang kurang menjanjikan.

a. Tingkat Kecukupan Jumlah dan Kemampuan Staf Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Tingkat Desa

Salah satu unsur yang penting dalam implementasi kebijakan adalah menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007) adalah kompetensi dan ukuran staf suatu badan. Menurutnya, implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Hal ini berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas dari sumberdaya manusia itu sendiri.

Terkait dengan kemampuan masing-masing pelaksana sebenarnya juga tidak jauh berbeda, dimana di Desa Ngringinrejo masih banyak orang yang tergabung ke dalam lembaga-lembaga tersebut, terutama Pokdarwis, belum mengetahui tugas dan perannya di Pokdarwis. Sehingga otomatis sampai saat ini Pokdarwis mampu berjalan adalah karena ke-tokohan dari ketua Pokdarwis yang mengelola agrowisata tersebut. Sementara itu di Desa Wedi, meskipun tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah budidaya salak, namun setiap petani anggota kelompok tani di sana mampu menjelaskan ketika ada pengunjung yang datang dan bertanya-tanya terkait cara perawatan dan budidaya salak yang baik, tetapi tidak dilakukan, lagi-lagi karena harga dari buah salak yang tidak seberapa.

3. Dukungan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

a. Sikap Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

Sikap pelaksana dalam hal ini pemerintah desa menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan termasuk juga kebijakan agropolitan. Yakni seberapa antusias pelaksana terhadap kebijakan tersebut dan sikapnya terhadap kelompok sasaran dan lingkungan merupakan bagian dari sikap pelaksana ini. Sikap ini juga dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan sosial, ekonomi maupun politik dari pelaksana kebijakan.

Di dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa Ngringinrejo sendiri, terlihat bahwa dukungan dari Pemerintah Desa cukup baik, hal ini terlihat dari sikap Kepala Desa dalam mendukung keberlangsungan kebijakan ini. Sedangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi sendiri, dukungan dari Pemerintah Desa sebenarnya ada, namun saat ini nampaknya Pemerintah Desa sendiri juga tidak terlalu memperhatikan terkait dengan agropolitan salak. Bahkan sikap Pemerintah Desa sendiri saat ini cenderung acuh terhadap kebijakan tersebut, pasalnya dengan kondisi desa yang kekurangan air di musim kemarau untuk mengairi tanaman salak yang ada di desa, Pemerintah Desa pernah mengusulkan kepada pihak Kabupaten untuk meminta jatah air, namun hingga saat ini menurutnya tidak pernah terealisasi, sehingga hal ini sangat mempengaruhi sikap dan komitmen Pemerintah Desa.

b. Komitmen Pemerintah Desa dalam Mendukung Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

Komitmen pemerintah dalam mendukung dan melaksanakan suatu kebijakan merupakan suatu unsur yang sangat penting. Agropolitan merupakan suatu kebijakan yang mengutamakan pembangunan desa dan masyarakatnya, sehingga dalam hal ini komitmen pemerintah desa untuk membangun desanya akan sangat dibutuhkan. Menurut Siagian (1989), dalam memasyarakatkan ide pembangunan, terutama yang bertumpu pada masyarakat desa, apabila tokoh-tokoh masyarakat sudah menerima dan berkomitmen untuk melaksanakan ide tersebut, besar kemungkinannya juga akan dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Komitmen pemerintah desa dapat dilihat dari bentuk dukungannya kepada pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Ngringinrejo memberikan dukungan melalui beberapa hal dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan budidaya agropolitan, mulai dari dana, ide kegiatan, maupun juga ketika ada permasalahan. Terkait dengan responsivitas pemerintah desa apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Desa Ngringinrejo, dalam hal ini pernyataan Kepala Desa menunjukkan bahwa setiap apa pun permasalahan yang terjadi desa terkait pengembangan kawasan agropolitan selalu dibahas dalam pertemuan rutin bulanan. Sedangkan untuk Pemerintah Desa Wedi, seakan sudah "tidak peduli" dengan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi. Bermula ketika Pemerintah Desa mengajukan permintaan bantuan pengairan ketika musim kemarau, yang bahkan sampai saat ini belum pernah terealisasi. Sehingga hal ini menyebabkan Pemerintah Desa acuh dan tidak lagi memperhatikan kondisi Salak Wedi.

4. Dukungan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

a. Tingkat Kepahaman Masyarakat terhadap Isi Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan yang mengedepankan pendekatan *bottom-up* dalam suatu kerangka pembangunan membutuhkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dukungan tersebut dapat hadir ketika masyarakat paham akan maksud dan tujuan dari suatu kebijakan pembangunan. Menurut Korten dan Carten (1993) dalam Hermawati (2004), sumber daya paling utama dalam konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah inisiatif dan kreativitas masyarakat dan tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan material dan spiritual. Artinya untuk mendapat dukungan dari masyarakat, maka suatu kebijakan harus mampu memberikan hasil yang terlihat dalam artian materi kepada masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan acuh dengan kebijakan tersebut. Tujuan utama dari kebijakan agropolitan adalah mengurangi kesenjangan yang terjadi antara kota desa melalui pengembangan wilayah perdesaan berdasarkan potensi utama perdesaan, dalam hal ini sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan di perdesaan. Tidak hanya itu, masyarakat desa beserta lembaga-lembaga lokal perdesaan adalah penggerak utamanya. Hal ini lah yang seharusnya dipahami oleh masyarakat desa.

Terkait dengan keahaman tersebut, Pemerintah Desa Ngringinrejo, dalam hal ini disampaikan oleh

Kepala Desa bahwa masyarakat desa sudah tahu dan paham bahwa desa mereka ditetapkan sebagai salah satu desa yang menjadi kawasan agropolitan. Masyarakat desa tersebut mayoritas sudah memiliki kesadaran karena mereka merasa sangat terbantu dengan adanya agropolitan ini. Namun dalam kesehariannya memang masih ada yang belum sadar, tetapi dapat dikatakan keberadaan mereka tidaklah banyak. Sedangkan di Desa Wedi, menurut Kepala Desa, masyarakat desa sudah tahu dan paham bahwa desa mereka ditetapkan sebagai salah satu desa yang menjadi kawasan agropolitan. Namun menurut Ketua Gapoktan Salak Desa Wedi, yang tahu dan paham bahwa Desa Wedi merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan, merupakan kalangan menengah ke atas, terutama yang sering ke balai desa. Namun, memang pada dasarnya, berjualan salak sudah lekat dengan masyarakat Desa Wedi, karena memang sudah lama Desa Wedi terkenal dengan salaknya, terutama di kalangan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya.

b. Tingkat Kesediaan Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

Menurut Kuitenbrouwer dalam Siagian (1989 : 58), pembangunan yang sesungguhnya tidak akan terwujud untuk, dan demi masyarakat kecuali dengan cara melalui, oleh, dan bersama rakyat itu sendiri. Sehingga yang harus dilakukan dalam hal ini menurut Siagian (1989) adalah dengan memberi tahu rakyat dengan mengajaknya diskusi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa Ngringinrejo, Masyarakat sangat mendukung kebijakan tersebut karena merasa sangat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Mereka yang dulu harus berkeliling ke kota-kota sebelah untuk menjual belimbing meskipun itu dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan sekarang yang mereka cukup berada di kebun belimbing, menunggu pengunjung datang untuk membeli belimbing mereka dengan harga yang cukup baik. Sedangkan di Desa Wedi sendiri yang mengetahui bahwa desa tersebut ditetapkan sebagai salah satu desa yang menjadi lokasi sumber daya paling utama dalam konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah inisiatif dan kreativitas masyarakat dan tujuan utama yang ingin dicapai adalah kesejahteraan material dan spiritual. Artinya untuk mendapat dukungan dari masyarakat, maka suatu kebijakan harus mampu memberikan hasil yang terlihat dalam artian materi kepada masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan acuh dengan kebijakan tersebut. Tujuan utama dari kebijakan agropolitan adalah mengurangi kesenjangan yang terjadi antara kota desa melalui pengembangan wilayah perdesaan berdasarkan potensi utama perdesaan, dalam hal ini sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan di perdesaan. Tidak hanya itu, masyarakat desa beserta lembaga-lembaga lokal perdesaan adalah penggerak utamanya. Hal ini lah yang seharusnya dipahami oleh masyarakat desa.

Terkait dengan keahaman tersebut, Pemerintah Desa Ngringinrejo, dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Desa bahwa masyarakat desa sudah tahu dan paham bahwa desa mereka ditetapkan sebagai salah satu desa yang menjadi kawasan agropolitan. Masyarakat desa tersebut mayoritas sudah memiliki kesadaran karena mereka merasa sangat terbantu dengan adanya

agropolitan ini. Namun dalam kesehariannya memang masih ada yang belum sadar, tetapi dapat dikatakan keberadaan mereka tidaklah banyak. Sedangkan di Desa Wedi, menurut Kepala Desa, masyarakat desa sudah tahu dan paham bahwa desa mereka ditetapkan sebagai salah satu desa yang menjadi kawasan agropolitan. Namun menurut Ketua Gapoktan Salak Desa Wedi, yang tahu dan paham bahwa Desa Wedi merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan, merupakan kalangan menengah ke atas, terutama yang sering ke balai desa. Namun, memang pada dasarnya, berjualan salak sudah lekat dengan masyarakat Desa Wedi, karena memang sudah lama Desa Wedi terkenal dengan salaknya, terutama di kalangan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya.

c. Tingkat Kesediaan Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan

Menurut Kuitenbrouwer dalam Siagian (1989 : 58), pembangunan yang sesungguhnya tidak akan terwujud untuk, dan demi masyarakat kecuali dengan cara melalui, oleh, dan bersama rakyat itu sendiri. Sehingga yang harus dilakukan dalam hal ini menurut Siagian (1989) adalah dengan memberi tahu rakyat dengan mengajaknya diskusi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa Ngringinrejo, Masyarakat sangat mendukung kebijakan tersebut karena merasa sangat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Mereka yang dulu harus berkeliling ke kota-kota sebelah untuk menjual belimbing meskipun itu dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan sekarang yang mereka cukup berada di kebun belimbing, menunggu pengunjung datang untuk membeli belimbing mereka dengan harga yang cukup baik. Sedangkan di Desa Wedi sendiri yang mengetahui bahwa desa tersebut ditetapkan sebagai salah satu desa yang menjadi lokasi pengembangan kawasan agropolitan hanya sebagian orang saja yang sering berkunjung di balai desa. Seakan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi tidak memberikan dampak apa-apa bagi mereka. Bagi mereka, lebih baik mengurus pertanian padi daripada mengurus tanaman salak yang hasilnya tidak seberapa, bahkan tidak sedikit orang yang menebang tanaman salak di sekitar rumahnya untuk didirikan bangunan atau ditanami tanaman lain.

Namun di luar itu semua, sebenarnya terjadi keadaan dimana kedua desa berada dalam kondisi yang serupa. Meskipun menunjukkan hasil yang cukup baik saat ini, pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Ngringinrejo pada awalnya juga tidak berjalan dengan baik. Menurut Ketua Pokdarwis, pada awal pelaksanaannya kebijakan agropolitan tidak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan terkesan hanya “asal” jalan, tanpa adanya koordinasi apapun, yang akhirnya kondisi tersebut berubah pada akhir tahun 2013 dengan adanya pemerintahan baru.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi Desa Ngringinrejo sama dengan kondisi Desa Wedi saat ini. Pada awal pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan Kawasan Agropolitan di kedua desa mengalami kondisi apa yang peneliti sebut dengan “Jebakan Harga” atau (*Price Trap*). Dimana pada awal pelaksanaan Kebijakan harga komoditas yang rendah menyebabkan komitmen Pemerintah Desa untuk mengembangkannya juga rendah sehingga kesadaran masyarakatnya juga akan rendah, dan akhirnya perawatan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh yang menyebabkan kualitasnya juga rendah yang kemudian akan menyebabkan harganya juga jatuh.

Gambar 1. Skema Kondisi Jebakan Harga (*Price Trap*) Harga Rendah

Komitmen
Pemerintah
Rendah

Kondisi ini terjadi secara siklik dimana apabila satu aspek rendah maka menyebabkan aspek yang lain menjadi rendah pula, begitu juga sebaliknya. Kedua desa mengalami kondisi ini di awal pelaksanaan kebijakan. Namun yang menjadi pembeda adalah Desa Ngringinrejo berhasil lepas dari kondisi ini dengan adanya pemerintahan yang baru pada akhir tahun 2013. Hal ini membuat komitmen Pemerintah Desa yang sebelumnya rendah menjadi naik yang dibuktikan dengan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada awal tahun 2014 dan dilanjutkan bersama masyarakat (petani) memperbaiki kualitas belimbingnya dengan perawatan yang lebih baik

sehingga harganya pun sekarang menjadi lebih baik. Dengan harga yang semakin membaik seperti saat ini Pemerintah Desa semakin berkomitmen untuk mengembangkan desanya melalui kebijakan agropolitan ini, tentunya bersama lembaga-lembaga terkait beserta masyarakat.

Berbeda dengan Desa Ngringinrejo yang berhasil keluar dari siklus ini, Desa Wedi masih terjebak dalam kondisi ini, dimana harga buah salak yang rendah menyebabkan Pemerintah Desa enggan untuk mengembangkan komoditas salak lebih lanjut, dari sisi masyarakatnya sendiri beberapa juga sudah enggan untuk merawat dan menebang pohon salaknya, sehingga baik dari kualitas maupun kuantitas produksi buah salak yang juga rendah. Hal ini kemudian diperparah dengan usulan Pemerintah Desa terkait bantuan pengairan kepada Kabupaten yang tidak ditanggapi secara serius, yang pada akhirnya menyebabkan kondisi ini terus berlanjut sampai sekarang.

KESIMPULAN

Studi perbandingan dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kondisi pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Agropolitan di dua desa. Dengan membandingkan beberapa aspek yakni (1) Manajemen Pengembangan Kawasan Agropolitan; (2) Kondisi Fisik Kawasan agropolitan; (3) Lembaga Pelaksana Kebijakan Agropolitan di Tingkat Desa; (4)

Dukungan Pemerintah Desa; dan (5) Dukungan Masyarakat Tani. Berdasarkan pembahasan mengenai perbandingan kelima aspek kritis dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di kedua desa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Desa Wedi menyerahkan sepenuhnya Manajemen Pengembangan Kawasan Agropolitan kepada Pemerintah Kabupaten, mulai dari perencanaannya, pendanaannya, maupun monitoring dan evaluasinya. Sedangkan Desa Ngringinrejo menerapkan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten yaitu secara sadar dan mandiri mengembangkan desanya melalui pengembangan kawasan agropolitan.
2. Secara keseluruhan, tidak banyak berbeda kondisi fisik kawasan agropolitan di Desa Ngringinrejo dan Desa Wedi. Pada dasarnya, kedua desa memiliki komoditas yang serupa yakni buah-buahan, dimana kedua komoditas (belimbing dan salak) di dua desa tersebut sama-sama sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Yang menjadi pembeda adalah bahwa Desa Ngringinrejo memiliki sumber air yang melimpah ketika musim kemarau yaitu aliran sungai bengawan solo. Sedangkan Desa Wedi harus berjuang untuk mendapatkan air ketika musim kemarau untuk mengairi tanaman salak. Di Desa Ngringinrejo, terdapat lembaga-lembaga yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan kawasan agropolitan. Sedangkan di Desa Wedi keberadaan lembaga-lembaga yang fokus pada pengembangan atau budidaya salak tidak ada.
3. Pemerintah Desa Ngringinrejo sangat mendukung terlaksananya Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan karena merasa terangkat nama desanya dengan adanya kebijakan agropolitan tersebut. Sedangkan di Desa Wedi, Pemerintah Desa sendiri seakan sudah “tidak peduli” dengan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi.
4. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Ngringinrejo, Masyarakat sangat mendukung kebijakan tersebut karena merasa sangat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Sedangkan di Desa Wedi sendiri yang mengetahui bahwa desa tersebut ditetapkan sebagai salah satu desa yang menjadi lokasi pengembangan kawasan agropolitan hanya sebagian orang saja yang sering berkunjung di balai desa. Seakan Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi tidak memberikan dampak apa-apa bagi mereka.

Namun di luar itu ada kondisi dimana kedua desa mengalami hal yang sama yakni ketika awal pelaksanaan kebijakan. Kondisi itu disebut sebagai “fenomena jebakan harga” atau “*price trap*”. Kondisi tersebut disebabkan oleh harga komoditas yang rendah sehingga menyebabkan komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan juga rendah, diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan juga rendah sehingga perawatan terhadap komoditas juga rendah, dan menyebabkan kualitasnya juga rendah dan akhirnya kembali menyebabkan harga yang rendah. Namun yang menjadi pembeda adalah bahwa Desa Ngringinrejo mampu keluar dari kondisi ini dengan adanya pemerintahan baru di akhir tahun 2013. Sedangkan kondisi di Desa Wedi diperparah dengan tidak ditanggapinya permintaan bantuan pengairan oleh Kabupaten.

DATAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2014. *Potensi Pertanian Indonesia Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Douglass, Mike. 1981. *Agropolitan Development : An Alternative for Regional Development in Asia*. The Himalayah Review : Nepal Geographical Society. Vol. 13. Pg : 37 – 71.
- Hermawati, Istiana, dkk. 2004. *Pengkajian Keswadayaan Masyarakat Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Departemen Sosial RI.
- Khoiriyah, Alifatul dkk. 2014. (Ed : Andrie Kisroh Sunyigono dkk.). *Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Agropolitan Di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. (Prosiding Seminar Nasional Agribisnis Dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan I)*. Universitas Trunojoyo Madura : UTM Press.

- Mahardhani, Ardhana Januar. 2012. *Implementasi Kebijakan Agropolitan Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Sendang Kabupaten Tulungagung)*. (Tesis). Surabaya : Universitas Airlangga.
- Mahi, Ali Kabul. 2014. *Agropolitan : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Miles, Mathew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Edisi Terjemahan. Penerjemah : Tjetjep Rohendi Rohidi) Jakarta : UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Iwan. Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Ed. Rev., cet 2. Jakarta : LP3S.
- Siagian. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Suyatno, Yulistyo. 2008. *Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan Di Kabupaten Semarang*. (Tesis). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressind